



Analisis Beban Administrasi Dan Evaluasi Program Pemasaran Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

Nisa' Noor Hasanah¹, Miladia Qiya Akhmas²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 08 Juni 2024

Revised: 17 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Penelitian ini membahas mengenai ada tidaknya beban administrasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta evaluasi terhadap program pemasaran pariwisata melalui kerja sama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penelitian ini menjadi penting adanya karena beban administratif dalam suatu instansi mempunyai keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara. Di samping itu pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pencarian (searching), baik melalui perpustakaan, sumber online, atau situs web. Penelitian ini menemukan bahwa beban administrasi dalam suatu instansi itu akan selalu ada dan wujudnya tidak selalu sama di setiap instansi. Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selalu mengupayakan terciptanya pelaksanaan kegiatan administratif agar berjalan dengan baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga telah memastikan agar setiap program kerja yang akan dilaksanakan tidak merugikan masyarakat lokal dan menjamin bahwa mereka dapat mempertanggungjawabkan tindakannya serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dikatakan telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan perluasan sektor pariwisata di wilayah Semarang.

Kata Kunci:

Beban Administrasi, Evaluasi, Pariwisata

(*) Corresponding Author:

nisahasanah412@students.unnes.ac.id,

miladiaqiya20@students.unnes.ac.id

How to Cite: Hasanah, N., & Akhmas, M. (2024). Analisis Beban Administrasi Dan Evaluasi Program Pemasaran Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 585-591. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12791464>

PENDAHULUAN

Beban administrasi pada lembaga pemerintahan merujuk pada segala biaya dan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tanggung jawab administratif dalam organisasi pemerintah. Pengeluaran administrasi ini mencakup berbagai hal seperti, anggaran perkantoran, pemeliharaan infrastruktur, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Tata kelola yang baik dan beban administratif dalam suatu instansi mempunyai keterkaitan erat. Sebab, beban administratif berdampak pada rencana dan anggaran, kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban administratif yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, analisis beban administratif harus dilakukan secara sistematis.

Dalam upaya menarik lebih banyak wisatawan di Kota Semarang, pihak-pihak terkait baik itu masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta harus bahu-

membantu membantu Kota Semarang dalam upayanya menarik lebih banyak wisatawan. Mengingat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menangani urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan di daerah yang bersangkutan, maka keberadaannya tentunya dapat membantu daerah tujuan wisata dalam mewujudkan potensinya sebagai daerah tujuan wisata. Tujuan pariwisata menurut undang-undang tentang kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual pengunjung wisatawan melalui waktu luang guna meningkatkan pendapatan nasional serta mengembangkan dan memperluas potensi industri pariwisata negara. Terbinanya hubungan positif antara pemerintah dan swasta serta masyarakat, serta unsur promosi program, menjadi pendorong utama efektivitas program dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Penerapan strategi pemasaran dan promosi pariwisata, seperti pembuatan materi promosi, pengadaan media promosi, dan penyelenggaraan pameran domestik dan internasional, sangat penting bagi pertumbuhan industri pariwisata. Salah satu upaya penerapan strategi pemasaran wisata dari DISBUDPAR yaitu dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau instansi lain.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengemban tugas dalam membuat perencanaan secara strategis dan meningkatkan standar pelayanan di industri pariwisata. Efektivitas rencana pelayanan yang diputuskan sejak awal dan kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memuaskan para wisatawan sendiri menjadi barometer kualitas pelayanan yang diberikan oleh DISBUDPAR Kota Semarang. Efektivitas suatu program dapat ditentukan dengan melihat apa yang direncanakan dan dilaksanakan, khususnya apakah *outcome* yang diperoleh sesuai dengan *outcome* perencanaan yang dilakukan. Dalam tata pelaksanaan administrasi harus mengatur suatu kegiatan yaitu melakukan pengawasan atau *monitoring*, agar pelaksanaan rencana dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dilakukannya *monitoring* adalah untuk mengumpulkan fakta, data, dan informasi mengenai pelaksanaan program, termasuk dilaksanakan atau tidaknya suatu kegiatan yang dimaksudkan selama proses pelaksanaan program. Selain itu, hasil dari proses *monitoring* akan memberikan data dalam proses evaluasi. Sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah hasil yang ditentukan dan dijalankan dari program memberikan hasil yang sesuai atau tidak.

Berdasar pada uraian di atas dan data informasi yang telah dikaji, maka permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut dapat dirumuskan dalam pertanyaan apakah terdapat beban administrasi yang ada dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya beban administrasi sehingga dapat dilakukan identifikasi dan analisis terkait beban administrasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta untuk memberikan evaluasi terhadap program pemasaran pariwisata melalui kerja sama dari DISBUDPAR Kota Semarang.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan kajian hukum yang meneliti

pelaksanaan faktual atau penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif (Undang-Undang) dan kontrak-kontrak dalam setiap kejadian hukum yang terjadi di lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber data didapatkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Buku, jurnal, artikel, kamus hukum, hasil penelitian terdahulu, informasi dari narasumber, serta sumber hukum tertulis lainnya digunakan sebagai sumber bahan sekunder studi ini. Teknik pengumpulan informasi hukum didapatkan lewat observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Di samping itu pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pencarian (*searching*), baik melalui perpustakaan, sumber online, atau situs web. Laporan yang didapat melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat koherensi atau kecocokan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Administrasi Instansi

Beban administrasi pada lembaga pemerintahan merujuk pada segala biaya dan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tanggung jawab administratif dalam organisasi pemerintah. Pengeluaran administrasi ini mencakup berbagai hal seperti, anggaran perkantoran, pemeliharaan infrastruktur, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Beban administrasi menjadi sangatlah penting agar lembaga pemerintah dapat terus beroperasi dengan lancar dan efisien. Hal ini mencakup segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan dan program pemerintah serta memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Untuk memastikan bahwa dana pemerintah digunakan secara efektif dan sejalan dengan tujuan pemerintah memerlukan pengamatan dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran administratif.

Ada atau tidaknya beban administrasi di suatu instansi akan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik. Memahami beban administratif pada lembaga pemerintah sangatlah penting karena hal ini membantu menjamin bahwa pemerintah berlaku adil, transparan, serta efisien dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu pula dapat mendukung terciptanya rencana kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan instansi pemerintah, serta efisiensi penggunaan dana, infrastruktur, dan SDM yang dimiliki instansi tersebut. Seiring dengan upaya dalam mengelola beban administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempromosikan potensi pariwisata daerah, berbagai langkah strategis dan kebijakan telah diimplementasikan. Penelitian ini menganalisis secara mendalam aspek-aspek tersebut untuk memahami lebih baik dinamika dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan etika administrasi publik menjadi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena prinsip-prinsip moral sudah tertanam dalam banyak proses kegiatan pelayanan publik, maka etika merupakan salah satu elemen kunci dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik. Seperangkat nilai dan pedoman yang dikenal sebagai etika administrasi publik mengontrol bagaimana pegawai dan pejabat publik

berperilaku saat menjalankan pekerjaannya. Pembentukan tata kelola yang efektif memerlukan fokus pada lima nilai fundamental: akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, responsivitas, dan orientasi konsensus. Kelima nilai ini diwujudkan dengan bantuan etika administrasi publik. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, dijamin oleh etika administrasi publik. Pelayanan publik yang lebih baik akan terlaksana bila etika administrasi publik diterapkan dengan baik.

Salah satu upaya penerapan strategi pemasaran wisata dari DISBUDPAR Kota Semarang yaitu dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau instansi lain. Dalam melakukan perjanjian kerja sama (MOU), Instansi tersebut memiliki *legal team* atau yang sekarang ini disebut bagian otonomi daerah; yang bertugas mengawal setiap akan dilakukannya MOU. Untuk memastikan kelancaran kerja sama terdapat indikator yang menjadi tolak ukur. Indikator tersebut dapat dilihat dari tujuan kerja samanya. Dengan adanya tujuan kerja sama yang telah ditetapkan tentunya akan terjadi proses negosiasi terkait pelaksanaannya. Dalam memulai suatu kesepakatan kerja sama (MOU) hal yang paling dasar untuk dibahas yaitu terkait biaya anggaran. Apakah kerja sama yang akan dilaksanakan tersebut memerlukan anggaran atau tidak serta dari mana sumber anggaran tersebut diperoleh. Meskipun kerja sama tersebut tidak memerlukan anggaran, namun tentunya akan selalu ada *cost* atau biaya pendanaan lain. Sehingga, hal tersebutlah yang selalu menjadi pembahasan krusial dalam setiap perjanjian kerja sama. Kerja sama yang diselenggarakan oleh DISBUDPAR Kota Semarang bersama pihak-pihak terkait, pada umumnya selalu terlaksana dengan baik. Kendala yang pernah dialami DISBUDPAR Kota Semarang dengan pihak yang bekerja sama yaitu ketika munculnya wabah *COVID-19* beberapa waktu lalu yang menimbulkan dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana hal tersebut tentunya juga berdampak pada pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Meskipun dihadapkan pada tantangan akibat pandemi *COVID-19* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DISBUDPAR Kota Semarang telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan penyesuaian program-program yang telah direncanakan. Hal tersebut terbukti dari setelah keadaan kembali membaik, program kerja sama yang telah tertunda sebagai akibat dari adanya wabah *COVID-19* kembali dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memulai suatu program kerja memperoleh anggaran rutin setiap bulannya. Pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menjalankan program DISBUDPAR. Apabila anggaran tersebut tidak cukup untuk menjalankan suatu program, pihak DISBUDPAR Kota Semarang dapat melakukan rekonsialisasi kemudian mengajukan anggaran tambahan. Dalam rentang waktu satu bulan tersebut, DISBUDPAR Kota Semarang dapat mengajukan anggaran tambahan lebih dari sekali, selama program periode sebelumnya telah selesai. Anggaran yang diperoleh akan masuk melalui dinas untuk selanjutnya dikelola oleh bendahara. Dalam proses pengajuan anggaran tambahan, selama ini tidak ada kendala hanya saja terdapat kesalahan teknis yang dihadapi oleh pihak DISBUDPAR Kota Semarang. Maka dari itu, proses pengajuan anggaran tambahan memerlukan ketelitian agar penggunaan

dana dapat efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan kesalahan teknis. Meskipun begitu, tetap tidak semudah yang dibayangkan dimana DISBUDPAR Kota Semarang meminta anggaran sekian dan langsung disetujui, tetap ada parameternya. Jika anggaran tersebut sudah terinci dengan jelas dan terstruktur, maka tidak ada alasan untuk menolak pengajuan anggaran tambahan. Maka dengan itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selalu berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sehingga semua program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

Suatu lembaga pemerintahan dapat dikatakan telah menjalankan fungsi administrasinya dengan baik, apabila pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berjalan lancar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah berusaha dalam menciptakan keadaan tersebut terbukti dari tidak adanya keluhan dari masyarakat setempat terkait pemasangan media promosi di luar ruangan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang masih menggunakan cara manual seperti menempel-nempel poster, sekarang telah berganti ke penggunaan videotron atau baliho yang tidak akan mengganggu masyarakat. Hal ini pula menjadi bukti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah.

Evaluasi Program Pemasaran Wisata

Evaluasi yaitu penghitungan pencapaian kinerja dari pelaksanaannya. Evaluasi seringkali dimaksudkan untuk menentukan seberapa baik kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Evaluasi dibutuhkan guna mengkaji ketidakseimbangan antara harapan dengan realitas yang dihadapi. Dalam menghadapi dinamika perubahan yang disebabkan pandemi dan PPKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dijalankan. Evaluasi ini menjadi jalan untuk keberhasilan suatu program dan memberikan masukan yang berharga untuk pengembangan program selanjutnya. Proses evaluasi ini memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan.

Dalam upaya menarik lebih banyak wisatawan, sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci. Penerapan strategi pemasaran dan promosi pariwisata menjadi kunci untuk pertumbuhan industri pariwisata. Kerja sama yang efektif dari para *stakeholders* masyarakat penting dalam menjalankan program promosi dengan baik. DISBUDPAR Kota Semarang dihadapkan pada tugas penting dalam membuat perencanaan strategis yang melibatkan peningkatan standar pelayanan di industri pariwisata. Dalam upaya mencapai tujuan ini, efektivitas rencana pelayanan menjadi fokus utama, dengan memastikan bahwa hasil yang didapat selaras dengan rencana yang ditetapkan. Proses evaluasi menjadi komponen integral dalam memastikan kinerja yang optimal dan memberikan kesempatan untuk perbaikan jika diperlukan.

Keberhasilan suatu program diukur dengan evaluasi, yang juga mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu program kerja. Keberhasilan suatu program dapat ditentukan dengan membandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang telah dicapai

dan dengan menentukan apakah *output*-nya sejalan dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. DISBUDPAR Kota Semarang telah mengaplikasikan segala proses tersebut dalam rangka untuk memperoleh hasil evaluasi dari setiap program yang mereka laksanakan. Evaluasi yang ada berupa evaluasi langsung setelah kegiatan atau program berakhir dan ada pula evaluasi rutin yang dilaksanakan per triwulan. Proses evaluasi yang dilakukan biasanya terkait dengan proses, hasil, maupun anggaran dari kegiatan atau program yang berjalan. Setiap program kerja dari DISBUDPAR Kota Semarang akan selalu dievaluasi; apakah program kerja tersebut telah mencapai target yang ditentukan atau belum. Jadi evaluasi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak perlu dilakukan setiap akhir tahun, namun sebaliknya dapat dilakukan setiap saat.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap aspek kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dapat dikatakan bahwa langkah-langkah yang telah diambil, secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik dan pertumbuhan industri pariwisata di wilayah Semarang. Pengelolaan administrasi yang tersusun dengan cermat; termasuk diantaranya pengelolaan anggaran, menunjukkan komitmen untuk mencapai efisiensi serta efektivitas DISBUDPAR Kota Semarang dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam strategi pemasaran dan promosi pariwisata menjadi esensi untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Meskipun dihadapkan pada tantangan serius seperti pandemi, DISBUDPAR Kota Semarang telah mampu beradaptasi dan menyesuaikan program-programnya. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas dan responsibilitas terhadap kondisi perubahan yang muncul.

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil penelitian, pembahasan, serta analisis yang didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa beban administrasi dalam suatu instansi itu akan selalu ada dan wujudnya tidak selalu sama di setiap instansi. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang ada, DISBUDPAR Kota Semarang mampu menunjukkan kemampuan adaptasinya dan dapat menyesuaikan program-program yang direncanakan sebelumnya. Instansi ini juga melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dijalankan. Proses evaluasi ini memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan. Dari hasil analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan oleh instansi ini, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh DISBUDPAR Kota Semarang telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan perluasan sektor pariwisata di wilayah Semarang.

SARAN

Dalam konteks administrasi pemerintah, beban administrasi merupakan hal yang krusial. DISBUDPAR Kota Semarang perlu terus mengadakan analisis pada beban administrasi yang ada secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang mungkin tidak efisien dan merumuskan

strategi untuk mengurangi beban administratif yang tidak perlu. Pengeluaran administrasi, seperti anggaran perkantoran dan pemeliharaan infrastruktur, perlu dikelola dengan cermat untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan promosi pariwisata Kota Semarang. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-event unik serta menggugah minat masyarakat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan. Selain itu, DISBUDPAR Kota Semarang juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi para pelaku usaha dan pegawai pariwisata di Kota Semarang. Salah satu peluang tersebut adalah dengan menyelenggarakan berbagai acara promosi bersama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan branding Kota Semarang sebagai kota tujuan pariwisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir penulisan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu selama proses penulisan artikel ini terutama kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selaku subjek dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiarta. "Mengatasi Tantangan Administrasi Publik Di Indonesia: Bagaimana Etika Memainkan Peran Pentingnya Dalam Membentuk Good Governance." *Kompas*. Last modified 2023. Accessed November 24, 2023.
- Kharisma, Dipta, and Tri Yuniningsih. "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 2 (2017): 770–781.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Nugroho, Rianto. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Setya, Mayang Vini. *STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PARIWISATA KOTA SEMARANG*, January 2018.
- Setyawan, Andreas Adi, Endang Larasati Setianingsih, and Fathurrohman. "Monitoring Program Kepariwisata Kota Semarang 'Ayo Wisata Ke Semarang' Tahun 2012." *Journal of Public Policy And Management Review* 2, no. 2 (April 2013).
- Simatupang, Patar, and Haedar Akib. "Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan." *Administrasi Publik* 2, no. 1 (2011).
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN*.